Penerapan Pengawasan Kepatuhan dalam Prinsip Mengenali Pengguna Jasa terhadap Notaris Daerah
Istimewa Yogyakarta
Briananda Rizaldi Muhammad, Dr. Sigid Riyanto, S.H., M.si.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

H.Salim. *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep, Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Leden Marpaung. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Marzuki. *Metodologi Riset: Panduan Penelitian Bidang Bisnis dan Sosial*. Yogyakarta: Ekonisia, 2005.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

Paku Utama. *Memahami Asset Recovery & Gatekeeper*. Jakarta: Indonesian Legal Roundtable, 2013.

Reza, Aulia Ali. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: MaPPI Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020.

R. Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cetakan XXIX. Jakarta: PT Intermasa, 2001.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Sumardjono, Maria S.W. *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014.

Tan Thong Kie. *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: PT Ichtiar Baru, 2007.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Penerapan Pengawasan Kepatuhan dalam Prinsip Mengenali Pengguna Jasa terhadap Notaris Daerah Istimewa Yogyakarta
Briananda Rizaldi Muhammad, Dr. Sigid Riyanto, S.H., M.si.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

C. Jurnal dan Tesis

Aliza, Natasha Olivia, Maman Sudirman, dan Benny Djaja. "Peran Notaris dan PPAT dalam Mencegah Pencucian Uang melalui Investasi Properti." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 13, no. 9 (2025).

Arbani, Tri Suhendra. "Penggunaan Dan Batasan Diskresi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Indonesia." *Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Widya Pranata Hukum,* Volume 1, (2), Oktober (2019)

Arifin, Khilda Luqyana, dan Yanuar Rahmadan. "Kebijakan Indonesia Menjadi Anggota Financial Action Task Force (FATF) Sebagai Kebijakan yang Rasional." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)* 13, no. 4 (2024).

Borman, M. Syahrul. "Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris." *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 3, no. 1 (2019).

Dhiva Savira Fadhilla, M., M. Arief Amrullah, dan Ainul Azizah. "Notary's Obligations to Prevent Suspicious Financial Transactions in Money Laundering Crimes." *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics* 8, no. 3 (2025).

Fitriah, Ria, dan Hudi Yusuf. "Implikasi Hukum Internasional terhadap Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia." *Jurnal Intelek Insan Cendekia* 1, no. 9 (2024).

Holidi, M. "Kekuatan Pembuktian Akta Otentik dalam Proses Peradilan Perdata." *Juridica* 4, no. 2 (2023).

Ilham, Ridho, Elwi Danil, dan Yoserwan. "Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh Notaris dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang." *Swara Justisia* 3, no. 4 (2020).

Lisnawati, Go. "Mengurai Permasalahan Hukum Terkait Transaksi Keuangan dalam Pencucian Uang." *AML/CFT Journal* 1, no. 2 (2023).

Qindy, Fatria Hikmatiar al. "Tanggung Jawab Notaris dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4, no. 2 (2023).

Rangkuti, Ibnu Syuaif, Mahmud Mulyadi, dan Suprayitno. "Implementasi Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) dalam Sektor Notaris Ditinjau dari UUJN." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (2025).

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Penerapan Pengawasan Kepatuhan dalam Prinsip Mengenali Pengguna Jasa terhadap Notaris Daerah Istimewa Yogyakarta
Briananda Rizaldi Muhammad, Dr. Sigid Riyanto, S.H., M.si.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Rendi Safitra, Nuzul Rahmayani, dan Anggun Lestari Suryamizon. "Pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh Notaris." *Sakato Law Journal* 1, no. 3 (2023).

Rizky Armanada. "Pengaruh Financial Action Task Force terhadap Terbentuknya Undang-Undang Pencucian Uang di Indonesia." *Jurnal JOM FISIP* 2, no. 2 (2015).

Sasmita, Romli. "Analisis Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2016).

Siska, Eliya Al-Afrida. "Peran Notaris dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang di Era Digital melalui Aplikasi goAML." *Jurnal Hukum to-ra* 8, no. 3 (2022).

Syahril Gunawan Bitu, "Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh Notaris Melalui *Fromulir Customer Due Diligence Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang di Kota Yogyakarta*, (Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2024).

Tuasikal, Umiasalamu, Normawati Normawati, Wahab Tuanaya, dan Safrudin Bustam Layn. "Implementation of Follow-up Actions on the Results of Inspectorate Audits." *Journal of Government Science Studies* 4, no. 2 (2025).

Wijaya, Michael Winters. "Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham Secara Video Conference." *Jurnal Rechtens* 12, no. 2 (2023).

Zarfinal dan Desmal Fajri. "Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam Pemeriksaan Protokol Notaris." *Jurnal Jurisprudentia HAM dan Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2021).

D. Surat Edaran dan Dokumen Resmi

Financial Action Task Force (FATF). *International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation* (2012–2025). Paris: FATF.

Financial Action Task Force (FATF). *Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Measures Indonesia: Fourth Round Mutual Evaluation Report*. Paris: FATF, 2023.

Financial Action Task Force (FATF). *2nd Enhanced Follow-up Report & Technical Compliance Re-Rating*. Paris: FATF, 2025.

Financial Action Task Force (FATF). *Procedures for the FATF AML/CFT/CPF Mutual Evaluations, Follow-Up and ICRG*. Updated 2025.

Surat Edaran Nomor AHU.UM.01.01-1239 Tahun 2019 tentang Panduan Pengawasan Kepatuhan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dan Pelaporan ke PPATK bagi Notaris.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Penerapan Pengawasan Kepatuhan dalam Prinsip Mengenali Pengguna Jasa terhadap Notaris Daerah Istimewa Yogyakarta
Briananda Rizaldi Muhammad, Dr. Sigid Riyanto, S.H., M.si.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Lampiran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.2.UM.01.01-4290 Tahun 2024 tentang Penyampaian Teknis Pelaksanaan Audit Pengawasan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ).

E. Sumber Internet

Ghansam Anand. "Jenis-jenis Akta yang Dibuat oleh Notaris." *Hukumonline*. Diakses 3 Desember 2025.

IFII PPATK. "Hati-hati Pencucian Uang, Kenali 2 Modus Ini!" 2024. Diakses 25 Desember 2025.

PPATK. "Keanggotaan Penuh FATF: Bekal Penting Menuju Indonesia Emas 2045." 2023. Diakses 27 Juli 2025.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. https://kbbi.web.id. Diakses 9 November 2025.